

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat. Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Definisi diatas memberikan tekanan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi

Perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan

diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya.

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk didalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*Financial Depeining*), dimana rata-rata jumlah harta bank di banyak negara ekonomi maju dan berkembang yang terikat dalam bentuk kredit. Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan, yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal Bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah.

Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang, yang merupakan salah satu bank yang memberikan jasa pemberian kredit kepada masyarakat. Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang, adalah kredit usaha rakyat (KUR). Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari pemberian kredit usaha rakyat (KUR) adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM & K kepada bank, pembelajaran UMKM untuk menjadi

debitur yang *bankable* sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya (Sebagai embrio debitur komersial), dan diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. (<http://www.bri.co.id/> KUR BRI/04 Oktober 2012).

Salah satu kelebihan dari kredit usaha rakyat (KUR) ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang sebagai pemberi kredit dapat memperoleh keuntungan dari pemberian kredit tersebut, sedangkan bagi masyarakat yang memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) ini khususnya bagi pengusaha kecil dan menengah dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya dan suku bunga yang dibebankan dalam kredit usaha rakyat (KUR) relatif terjangkau yakni maksimum 10% dari modal untuk pihak yang terkait dengan bank, dan maksimum 20% untuk pihak tidak terkait dengan bank. Pemberian kredit usaha rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dari pemberian kredit tersebut adalah kemungkinan terjadinya resiko kredit bermasalah yang mengakibatkan terjadinya tunggakan kredit dan kredit macet. Jumlah kredit bermasalah dari tahun ke tahun khususnya kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang terus meningkat.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Prosentase Jumlah KUR Bermasalah dari Tahun 2009-2011

Tahun	Jumlah KUR yang Direalisasikan	Jumlah KUR yang Bermasalah	Prosentase Jumlah KUR Bermasalah
2009	Rp. 925.000.000,00	Rp. 44.400.000,00	4,8 %
2010	Rp. 1.075.000.000,00	Rp. 55.900.000,00	5,2 %
2011	Rp. 1.225.000.000,00	Rp. 66.150.000,00	5,4 %

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009, 2010, dan tahun 2011 jumlah kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang terus meningkat. Dimana pada tahun 2009 jumlah kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah adalah 4,8 %. Lalu pada tahun berikutnya yaitu tahun 2010 jumlah prosentase kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang meningkat 0,4 % atau sebesar 5,2 %. Pada tahun 2011 jumlah prosentase kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah juga meningkat, namun peningkatnya lebih sedikit daripada tahun 2009 ke tahun 2010 yaitu sebesar 0,2% atau sebesar 5,4 %. Dengan meningkatnya jumlah kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang membuktikan bahwa prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) belum memadai dan belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal sesuai prosedur yang telah diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang.

Hal yang perlu diperhatikan bank di Indonesia, khususnya bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang dalam mengurangi kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah adalah dengan menangani proses penggunaan serta pemeliharaan kredit usaha rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh para pihak secara berkesinambungan dari awal pemberian kredit hingga pada saat pelunasannya. Penanganan ini sangat diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan adanya rentang waktu pengembalian pinjaman akan menimbulkan resiko yang sangat besar dan mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur.

Timbulnya kredit bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para nasabah. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, tidak sedikit bank-bank yang telah berdiri menjadi bangkrut dikarenakan gagalnya pengembalian kredit yang telah dipinjamkan. Banyak pula yang melakukan merger untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Berbagai macam masalah yang terjadi dalam penyaluran kredit dapat dicegah dengan cara pihak bank melakukan evaluasi yang dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya resiko yang muncul dalam pelaksanaan pemberian kredit. Menurut Sunarti (2008:87), faktor-faktor yang perlu dievaluasi oleh pihak bank dalam pemberian kredit kepada calon nasabah dapat menggunakan 5 C (*The Five C's of Credit*), yaitu *Character*

(watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Dalam menangani kredit yang bermasalah ini, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang juga harus memiliki prosedur pemberian kredit yang handal dan dapat dipercaya dalam mengelola kredit. Tujuan dibentuknya prosedur pemberian kredit oleh bank adalah untuk meningkatkan pengendalian intern yang diharapkan dapat meminimalisir resiko-resiko pemberian kredit. Penerapan pengendalian kredit yang baik juga diharapkan sebagai penilaian sekaligus memperbaiki atas prosedur yang sebelumnya telah digunakan. Namun pada prosedur penyaluran kredit untuk meningkatkan pengendalian intern oleh bank belum tentu berjalan dengan lancar, artinya masih terdapat kredit bermasalah. Faktor-faktor penyebab munculnya kredit bermasalah atau kredit macet adalah keteledoran pihak bank dalam mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan, terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada prosedur yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas debitur lama. Bagi pihak nasabah sendiri banyak kendala yang harus dihadapi, misalnya mereka tidak sanggup mengembalikan kredit yang telah dipinjam karena ada penurunan hasil keuntungan dari usaha bisnisnya.

Menyadari pentingnya penerapan sistem pengendalian intern dalam prosedur pemberian kredit, maka penulis memutuskan untuk menyusun skripsi dengan judul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Upaya Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kredit Bermasalah. (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang?
2. Bagaimana sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR)

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang.

2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang dalam

mengurangi kemungkinan terjadinya kredit usaha rakyat (KUR)

bermasalah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

a. Sebagai bahan informasi bagi pembaca mengenai evaluasi

prosedur dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dalam

rangka meningkatkan sistem pengendalian intern.

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai segala

sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan

pemberian kredit usaha rakyat dan sistem pengendalian intern.

2. Kontribusi Praktis

a. Peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi sebagai

bahan pertimbangan organisasi dalam memecahkan permasalahan,

terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kredit usaha

rakyat (KUR).

b. Diharapkan dapat menambah dan melengkapi referensi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, berikut diuraikan mengenai tata urutan secara garis besar, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi topik masalah yang ditulis dan nantinya dapat membantu memecahkan masalah yang diteliti.

Bab III : Metode Penelitian

Akan dijelaskan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, serta metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum perusahaan dan hasil penelitian dan pembahasan masalah.

Bab V : Penutup

Pada Bab ini akan disajikan kesimpulan mengenai hasil yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta ditutup dengan saran-saran atau rekomendasi yang dipandang relevan dengan hasil analisis dan bermanfaat bagi pengembangan perusahaan di masa yang akan datang.

